

# Tantangan Masyarakat Perbatasan Indonesia dalam Integrasi Asean

Oleh:

Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc,Ph.D

Pusat Studi Asean Universitas Mulawarman  
Samarinda-Kalimantan Timur

Paper disampaikan ke Ditjen Kerjasama Asean  
untuk Konferensi Bersama Sekretariat Nasional Asean –Indonesia  
dan PSA di Jakarta 30 Agustus 2017.

[tukkasean@kemlu.go.id](mailto:tukkasean@kemlu.go.id)/[ksal.aseankemlu@kemlu.go.id](mailto:ksal.aseankemlu@kemlu.go.id)

## Ringkasan

Indonesia adalah negara terbesar dan terluas serta memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara semua anggota negara Asean, sehingga semestinya Indonesia menjadi leader atau pemimpin dalam menentukan arah perjalanan dan tujuan dari berdirinya Asean serta dapat memanfaatkan Asean sebagai salah satu alat bagi Bangsa Indonesia untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara Republik Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia harus dapat mendefenisikan Asean sebagai salah satu sumber daya terpenting bagi Bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan, bukan malah sebaliknya dimana Indonesia menjadi sumber daya terpenting bagi negara Asean lainnya, terutama untuk pembangunan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan Indonesia semestinya dibangun bukan untuk menambah pasar yang baru bagi negara Asean lainnya untuk menjual produk-produknya melainkan semestinya menjadi tempat bagi masyarakat Indonesia yang diperbatasan untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dikawasan negara tetangga.

Kawasan perbatasan dan terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Philippina dan (Brunai) adalah merupakan wilayah yang merupakan garda paling depan Indonesia dalam menghadapi dampak dari integrasi Indonesia dengan Asean, namun masih banyak diantara kawasan perbatasan tersebut yang secara ekonomi tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti misalnya di Kalimantan antara Indonesia dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak). Sehingga angan-angan untuk memperoleh manfaat dari integrasi dapat diwujudkan bukan malah berubah menjadi kawasan yang rentan, vulnerabel ataupun subordinat oleh karena daya saing yang sangat lemah.

Searah dengan Nawacita Presiden Jokowi bahwa akan menjadikan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar sebagai garda terdepan Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia luar termasuk dalam pengintegrasian Indonesia dengan Asean, maka Pusat Studi Asean Universitas Mulawarman sejak tahun 2014 melakukan pengkajian terhadap berbagai permasalahan perbatasan, khususnya Kalimantan dengan Malaysia dalam kaitannya dengan persoalan sosial, budaya dan ekonomi di kedua kawasan, terutama pada titik-titik terjadinya pelintas batas di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Pulau Kalimantan.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat Indonesia yang berada diperbatasan pada posisi yang diuntungkan jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia? atau justru berada pada posisi yang lemah?. dan sangat tergantung pada sikap dan sistem yang diciptakan oleh Malaysia sehingga Indonesia menjadi bagian dari sistem yang dikembangkan oleh Malaysia yang kemudian membuat daya tawar warga negara Indonesia sebagai pelintas batas sangat lemah. Juga untuk mengetahui kompetitiveness produk-produk lokal dengan produk negara tetangga, maupun memperoleh gambaran umum benefit apa saja yang dinikmati warga negara Indonesia menjadi pelintas batas serta kendala apa saja yang dihadapi warga negara Indonesia dalam menghadapi semakin meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa di wilayah perbatasan tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa daya tawar masyarakat perbatasan Indonesia khususnya yang berada disepanjang perbatasan Kalimantan, Kalimantan Barat, Timur maupun Kalimantan Utara menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan bukanlah pihak yang sangat diuntungkan dengan pengintegrasian masyarakat kedalam pasar tunggal Asean. Produk-produk lokal masyarakat perbatasan Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk dari negara tetangga karena tidak kompetitif, rendah teknologi, maupun durability yang sangat rendah. Demikian halnya dengan sumber daya manusia kalah bersaing dengan masyarakat Malaysia sehingga masyarakat Indonesia lebih mendominasi posisi buruh atau tenaga kerja kasar sedangkan masyarakat Malaysia menjelma menjadi bos alias majikan. Pasar perbatasan yang semestinya menjadi peluang bagi warga negara Indonesia memasarkan produknya justru menjadi perluasan bagi pasar Malaysia untuk menjual produk-produk industrinya sedangkan produk pertanian lokal dari Indonesia dijual murah karena kualitas dan kemasan yang kurang.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia diperbatasan dalam menghadapi dominasi masyarakat Malaysia maupun serbuan produk Malaysia adalah akses informasi dan teknologi maupun infrastruktur yang sangat rendah di wilayah Indonesia untuk memasuki pasar-pasar domestik, sedangkan akses untuk pasar di Malaysia terbuka lebar namun dengan berbagai persyaratan dan kondisi yang cenderung merugikan rakyat Indonesia seperti perlakuan oleh kepolisian di Raja Malaysia yang ada kalanya berlebihan, seperti pembongkaran paksa atas barang yang sudah dibeli dari Malaysia ditengah laut oleh polisi perairan Malaysia, ataupun pengaturan kepabeanan dipelabuhan Malaysia yang mewajibkan berbagai ketentuan tak tertulis, seperti batasan membawa uang ringgit ke Indonesia, dan larangan membawa rupiah ke Malaysia.

Seorang petani Krayan di Nunukan yang harus memundak 50 kg beras sejauh 5 KM namun harus berhenti dipos penjagaan tentara Malaysia dan tidak diperkenankan membawa beras tersebut masuk kedesa di Malaysia (Bakelalan) dan harus rela mengganti beras tersebut dengan hanya 5 liter bensin adalah sebuah bentuk transaksi perdagangan

yang tidak berkeadilan karena kelemahan infrastruktur Indonesia. Adalah sebuah bentuk penghisapan tenaga manusia antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Bagaimana tidak, beras yang menjadi makanan utama di perbatasan Malaysia, ditanam dan dipundak oleh warga negara Indonesia melalui waktu dan tenaga yang luar biasa banyak, namun diganti dengan murah oleh warga Malaysia karena ketidaktersediaan barang kebutuhan dari Indonesia.

Menciptakan keadilan dalam perspektif integrasi Indonesia ASEAN khususnya dikawasan perbatasan Indonesia adalah sebuah pekerjaan besar bagi Bangsa Indonesia, karena disana terjadi penghisapan dan perbudakan, dan disana terjadi penggunaan kekuasaan dan per-modalannya (uang), dan disana terjadi hegemoni antara Malaysia yang menganggap dirinya superior dan rakyat Indonesia yang mereka sebut *Indon* yang menggambarkan pandangan imperioritas terhadap warga Indonesia.

Pengintegrasian masyarakat perbatasan Indonesia ke Asean tidak saja menjadi persoalan ekonomi atau perdagangan semata, ternyata adalah sebuah pertarungan dalam mengejar harga diri serta harkat dan martabat kebangsaan.

Bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengejar ketertinggalan ini?, adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan benar-benar membangun perbatasan. Perbatasan jangan hanya dijadikan sebagai komoditas politik ketika Pilkada atau Pemilihan Presiden, persoalan perbatasan adalah persoalan bagaimana menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangsa Indonesia dihadapan bangsa lain, bukan jargon dan bukan juga bahan kampanye sebab disana sedang berlangsung pertarungan dan pemangsaan dari yang kuat ke yang lemah, dan sangat disayangkan pihak yang lemah itu adalah rakyat kita, Rakyat Indonesia.

Seorang tokoh masyarakat perbatasan berkata” ...SEMUA PEJABAT PENTING INDONESIA MULAI DARI BUPATI, GUBERNUR, ANGGOTA DPR, DPD MENTERI, PANGLIMA TNI., SAMPAI PADA PRESIDEN SUDAH MENGUNJUNGI PERBATASAN, NAMUN PERBATASAN TETAPLAH PERBATASAN TIDAK ADA PERUBAHAN, HANYA HANTU BARANGKALI YANG BELUM PERNAH KEPERBATASAN, KALAU HANTU YANG DATANG MAKA KAMI AKAN HIJRAH KE MALAYSIA..”

## **1. Derita Pelintas Batas Indonesia**

Jika ditarik garis batas antara Indonesia (Kalimantan) dengan Sabah dan Serawak terdapat lebih dari 200 kilometer garis batas yang melingkupi 3 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pos lintas Batas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara seperti Entikong Kalbar dan Krayan dan Nunukan Kalimantan Utara merupakan lalulintas barang dan manusia terpadat di wilayah perbatasan dan merupakan pintu keluar masuk barang dan jasa

